

**KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGANI PRA  
BENCANA GUNUNG SLAMET DI DESA KUTABAWA KECAMATAN KARANGREJA  
KABUPATEN PURBALINGGA JAWA TENGAH**

**Andhini Amirudin Ambo<sup>1</sup>, Susi Sulandari<sup>2</sup>, Nina Widowati<sup>3</sup>**

**Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang Semarang 50239, Phone: +622476486851  
Email : [andhini.ambo@yahoo.com](mailto:andhini.ambo@yahoo.com)**

**ABSTRACT**

*This study aimed to describe and analyze the performance of the Regional Disaster Management Agency The Purbalingga in handling pre-disaster on Mount Slamet , is already in line with the vision and mission BPBD , as well as to describe and analyze what are the dimensions that hinder the performance of BPBDs . This research was conducted through qualitative descriptive . The number of informants in this study were 3 informants Chief executive , head of administration of sub-section , and the section head of preventive and preparedness measures taken by purposive sampling technique . Data collection techniques by observation , interviews , documentation and literature study.*

*The results showed that the dimension of productivity , responsibility , and accountability BPBD ;p];Purbalingga in pre-disaster activities were optimal . There is still not optimal dimensions of BPBD The Purbalingga the dimensions of service quality and responsiveness.*

*The conclusion from this study that the performance is in accordance with his vision BPBDs seen from the dimensions used productivity through socialization introduction of hazards and how to deal with it. BPBDs performance also is in conformity with its mission seen from the dimensions of productivity that are used in implementing risk reduction activities that recognize hazards and develop a culture of disaster awareness can be seen from the implementation of all pre-disaster activities in the village Kutabawa.*

**Key words : Performance, BPBDs Purbalingga, Pre Disaster , and Mount Slamet .**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menangani pra bencana di Gunung Slamet, apakah sudah sesuai dengan visi dan misi BPBD, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis dimensi-dimensi apa sajakah yang menghambat kinerja BPBD. Penelitian ini dilakukan melalui deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 3 informan yaitu Kepala pelaksana, Kepala sub bagian tata usaha, dan Kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi produktifitas, responsibilitas, dan akuntabilitas BPBD Kabupaten Purbalingga dalam kegiatan pra bencana sudah optimal. Terdapat dimensi yang masih belum optimal dari BPBD Kabupaten Purbalingga yaitu dimensi kualitas layanan dan responsivitas.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kinerja BPBD sudah sesuai dengan visinya dilihat dari dimensi produktivitas yang digunakan melalui kegiatan yang dilakukan BPBD dalam pra bencana Gunung Slamet. Kinerja BPBD juga sudah sesuai dengan misinya dilihat dari dimensi produktivitas,

---

<sup>1</sup>Andhini Amirudin Ambo, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, [andhini.ambo@yahoo.com](mailto:andhini.ambo@yahoo.com)

<sup>2</sup>Susi Sulandari, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Nina Widowati , Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

responsibilitas dan akuntabilitas yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengurangan risiko yaitu mengenal bahaya bencana dan mengembangkan budaya sadar bencana dapat dilihat dari terlaksananya semua kegiatan pra bencana termasuk membangun penanggulangan bencana yang handal di Desa Kutabawa.

**Kata-kata kunci : Kinerja, BPBD Kabupaten Purbalingga, Pra Bencana, dan Gunung Slamet.**

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Gunung Slamet (3.428 meter dari permukaan laut) adalah gunung berapi yang terdapat di Pulau Jawa. Gunung ini berada di perbatasan Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan merupakan yang tertinggi di Jawa Tengah serta kedua tertinggi di Pulau Jawa. Secara geografis puncak Gunung Slamet terletak pada posisi 7° 14' 30" Lintang Selatan dan 109° 12' 30" Bujur Timur. Kawah IV merupakan kawah terakhir yang masih aktif sampai sekarang, dan terakhir aktif hingga pada level siaga.

Bab IV Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang kelembagaan, dinyatakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga di tingkat nasional yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Adapun di tingkat daerah, badan dimaksud disebut dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan ini terdapat di tingkat Provinsi, dan masing-masing daerah kabupaten/kota.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada tahap pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana,

prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketatausahaan.

Kegiatan observasi terdapat misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga yang belum diterapkan yaitu membangun sistem penanggulangan bencana yang handal dan dari segi dimensinya ada kekurangan dalam dimensi responsivitas yaitu kesadaran masyarakatnya akan bahaya bencana masih kurang. Melihat pemaparan ini, maka peneliti tertarik mengambil judul sebagai berikut **"Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Menangani Pra Bencana Gunung Slamet di Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah"**

### B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan pokok-pokok pikiran secara jelas mengenai hakikat dari masalah tersebut sehingga akan mempermudah kita untuk memahaminya. Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menangani pra bencana di Gunung Slamet sudah optimal sesuai dengan Visi dan Misi khususnya mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Pra Bencana ?
2. Dimensi-dimensi apa sajakah yang menghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga

<sup>1</sup>Andhini Amirudin Ambo, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, [andhini.ambo@yahoo.com](mailto:andhini.ambo@yahoo.com)

<sup>2</sup>Susi Sulandari, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Nina Widowati, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

dalam menangani pra bencana di Gunung Slamet ?

mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

### C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menangani pra bencana di Gunung Slamet sudah optimal sesuai dengan Visi dan Misi khususnya mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Pra Bencana.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dimensi-dimensi yang menghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menangani pra bencana di Gunung Slamet.

### D. TEORI

#### Administrasi Publik

Seringnya situasi bencana melanda kondisi masyarakat, menjadikannya sebagai *common and publik problem* yang menuntut kehadiran tindakan intervensi kolektif sebagaimana menjadi domain administrasi publik. Sebagai pola tindak intervensi yang kolektif, administrasi publik dituntut mampu memainkan peran yang menjadi tanggung jawabnya dalam manajemen bencana. Pertama, administrasi publik turut bermain secara praktis maupun normatif-regulatif (melalui instrumen kebijakan) dalam berbagai aktivitas pemanfaatan sumber daya; kedua, administrasi publik bertanggung jawab langsung maupun tidak langsung terhadap situasi yang menciptakan kerugian pada masyarakat; ketiga, administrasi publik bertanggung jawab langsung untuk memberikan perlindungan, penangan, dan melakukan pencegahan atas berbagai kemungkinan dampak bencana kepada masyarakat.

Chandler dan Plano dalam Keban (2014:3) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan

### Organisasi

Kata organisasi berasal dari bahasa Inggris *organization*, yang bentuk invinitifnya adalah *to organize*. Kata *to organize* diberi arti menyusun atau mengatur bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain, yang tiap-tiap bagian mempunyai satu tugas khusus dan atau berhubungan dengan keseluruhan. berikut definisi organisasi menurut beberapa para ahli (Anton Athoillah, 2010:170-171):

- a. James D Mooney mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
- b. Menurut Dimock, organisasi adalah perpaduan secara sistematis antara bagian-bagian yang saling bergantung/berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- c. Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan bahwa organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok pemegang posisi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu
- d. Sugandha mengatakan bahwa organisasi adalah kumpulan manusia yang mempunyai kepentingan yang sama, yang karena keterbatasan sumber yang mereka miliki, mereka mengikatkan diri dalam kerja sama pembagian tugas yang jelas dalam mencapai tujuan guna meraih kepentingan masing-masing

### Kinerja

Terminologi kinerja merupakan suatu istilah dalam manajemen yang didefinisikan melalui perspektif atau sudut pandang yang berbeda oleh para ahli. Menurut Rivai dan Basri (2005) bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan

<sup>1</sup>Andhini Amirudin Ambo, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, [andhini.ambo@yahoo.com](mailto:andhini.ambo@yahoo.com)

<sup>2</sup>Susi Sulandari, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Nina Widowati, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Kinerja juga merupakan alat ukur manajemen yang digunakan untuk menilai tingkat pertanggungjawaban seseorang dalam melakukan tugasnya.

### Kinerja Organisasi

Menurut Wibawa dan Atmosudirjo (Pasolong, 2007:176) bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuannya yang tentu saja akan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa fisik seperti sumber daya manusia maupun nonfisik seperti peraturan, informasi dan kebijakan, maka untuk lebih memahami mengenai faktor-faktor yang mampu mempengaruhi sebuah kinerja organisasi.

Konsep kinerja organisasi juga menggambarkan bahwa setiap organisasi publik memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat dilakukan pengukuran kinerjanya dengan menggunakan dimensi-dimensi kinerja yang ada untuk melihat apakah organisasi tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan untuk mengetahui tujuannya sudah tercapai atau belum.

### Konsep Pengukuran Kinerja

Ismail Nawawi (2013:233) pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok dimensi kinerja kegiatan yang berupa dimensi-dimensi masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam

proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

### Manfaat Pengukuran Kinerja

Ismail Nawawi (2013:235) melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi pemerintah dapat mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi. Pengukuran kinerja setiap instansi dapat diperbandingkan dengan instansi yang sejenis, sehingga penghargaan dan tindakan disiplin dapat dilakukan secara lebih objektif.

### Dimensi Kinerja

Secara konseptual Lembaga Administrasi Negara/LAN (2001:9) mengemukakan bahwa dimensi kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dimensi kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*). Selain itu, dimensi kinerja digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana telah dibahas dalam materi pelajaran untuk perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa dimensi kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada

<sup>1</sup>Andhini Amirudin Ambo, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, [andhini.ambo@yahoo.com](mailto:andhini.ambo@yahoo.com)

<sup>2</sup>Susi Sulandari, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Nina Widowati, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

akhirnya kinerja instansi/unit kerja pelaksanaannya.

### Strategi dan Metode Pengukuran Kinerja Organisasi

Ismail Nawawi (2013:245) pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam usaha pencapaian tujuan, oleh karena melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dan pengukuran kinerja dapat memberikan penilaian (justifikasi) yang objektif dalam pengambilan keputusan organisasi maupun manajemen.

### Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap dimensi kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

### Analisis Akuntabilitas Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang ditetapkan dalam rencana startegik. Dalam analisis ini dijelaskan juga perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi

kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik untuk kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya

### E. FENOMENA

Pelayanan pada saat pra bencana merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam serangkaian upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap potensi terjadinya bencana pada suatu wilayah. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi :

- a. Melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
- b. Melaksanakan pengurangan risiko bencana.
- c. Melaksanakan pencegahan.
- d. Melaksanakan pemanduan dalam perencanaan pembangunan.
- e. Melaksanakan persyaratan analisis risiko bencana.
- f. Melaksanakan pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang.
- g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
- h. Melaksanakan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Dari penjelasan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga di atas, peneliti memutuskan memakai dimensi-dimensi sebagai berikut :

- a. Produktivitas  
Konsep produktivitas diukur dari input dan output dari organisasi. Input dari suatu organisasi dilihat dari ketersediaan dana, Sumber daya manusia, ketersediaan waktu, fasilitas dan Undang-Undang. Sedangkan outputnya dilihat dari pelayanan penanggulangan pra bencana, informasi terkait bencana dan program kegiatan pra bencana.

<sup>1</sup>Andhini Amirudin Ambo, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, [andhini.ambo@yahoo.com](mailto:andhini.ambo@yahoo.com)

<sup>2</sup>Susi Sulandari, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Nina Widowati, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

- b. Kualitas layanan  
Merupakan dimensi yang relatif tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah digunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi dimensi untuk menilai kinerja birokrasi publik.
- c. Responsivitas  
Kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.
- d. Responsibilitas  
Menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit dan implisit dan pertanggungjawaban ke masyarakat.
- e. Akuntabilitas  
Keterbukaan informasi publik dalam kegiatan pra bencana menunjukkan seberapa besar kesesuaian penanggulangan bencana dengan nilai-nilai atau norma yang ada di masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

## F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Tujuan penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab-akibat sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu, mencoba menerobos dan mendalami gejalanya dengan meninterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti

permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut.

Teknik pengambilan informan pada metode kualitatif yang dipilih adalah *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada informan yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk mendapatkan data yang valid dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk pembahasan dan pemecahan suatu masalah. Untuk mendapatkan data-data di objek penelitian, teknik yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian berupa penyajian data yang diperoleh peneliti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat diketahui masih ditemukan permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan

<sup>1</sup>Andhini Amirudin Ambo, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, [andhini.ambo@yahoo.com](mailto:andhini.ambo@yahoo.com)

<sup>2</sup>Susi Sulandari, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Nina Widowati, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

penanggulangan prabencana erupsi Gunung Slamet di Desa Kutabawa dilihat dari dimensi kualitas layanan dan responsivitas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga diamanatkan bertugas menjalankan penyelenggaraan penanggulangan prabencana erupsi Gunung Slamet di Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dan mampu menjadi lembaga penyelenggaraan penanggulangan prabencana erupsi Gunung Slamet yang berkinerja baik sesuai yang dicanangkan dalam visi dan misi organisasi dilihat dari dimensi produktivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

## PEMBAHASAN

Peneliti akan menyajikan analisis mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menangani penanggulangan prabencana Gunung Slamet di Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Kinerja tersebut dapat diketahui berdasarkan lima dimensi kinerja yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Untuk mengetahui hasil penelitian tentang lima dimensi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.

### Produktivitas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga saat pra bencana melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana dan melakukan koordinasi dengan mitra-mitranya sebelum melaksanakan kegiatan pra bencana di Desa Kutabawa.

### Kualitas layanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Kutabawa berupa simulasi dan sosialisasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dirasa masih kurang jumlah sumber daya

manusianya jika dibandingkan dengan beban kerja utamanya ketika proses penyelenggaraan bencana.

### Responsivitas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui kegiatan simulasi, sosialisasi, pemasangan rambu-rambu evakuasi dan *early warning system* serta informasi tentang bencana Gunung Slamet. Sangat disayangkan masih banyak masyarakatnya yang tidak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.

### Responsibilitas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana selalu bekerjasama dengan mitra-mitra yang terkait dengan bencana yaitu TNI, Polri, SAR, PMI, dan berbagai lembaga sosial masyarakat. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga di Desa Kutabawa dengan mengusulkan kepada Dinas Pekerja Umum untuk memperbaiki jalur evakuasi dengan mengusulkan kepada Dinas Pekerja Umum untuk memperbaiki jalur evakuasi sepanjang 5 kilometer.

### Akuntabilitas

Ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga untuk membentuk Desa Kutabawa menjadi desa siaga bencana melalui kegiatan-kegiatan pra bencana yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai bagaimanakah kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani pra bencana Gunung Slamet sudah optimal sesuai dengan

<sup>1</sup>Andhini Amirudin Ambo, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, [andhini.ambo@yahoo.com](mailto:andhini.ambo@yahoo.com)

<sup>2</sup>Susi Sulandari, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Nina Widowati, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga

- a. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan visinya. Dilihat dari dimensi produktivitas dan akuntabilitas yang digunakan dalam pelaksanaannya di Desa Kutabawa dengan melalui kegiatan sosialisasi pengenalan bahaya bencana dan cara menghadapi bencana serta simulasi evakuasi yang dilaksanakan tanggal 14 Maret 2014 yang bertujuan membuat tangguh masyarakatnya dalam menghadapi bencana dan menjadikan Desa Kutabawa desa yang siaga bencana.
- b. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan misinya yang pertama yaitu melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana. Dilihat dari dimensi produktivitas yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengurangan risiko yaitu mengenal bahaya bencana Gunung Slamet yang ada di Desa Kutabawa, mengembangkan budaya sadar bencana di Desa Kutabawa, mengajak relawan untuk ikut dalam kegiatan di Desa Kutabawa dan dapat memberi semangat masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi serta memasang banner-banner di posko yang berisi informasi-informasi terkait dengan bencana dan cara penanggannya.
- c. Misi berikutnya adalah membangun sistem penanggulangan bencana yang handal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan lembaga Orang Indonesia Crisis Center memasang *Early Warning System* di Dusun Bambang Dessa Kutabawa, yang nantinya dapat dideengar sejauh 1 kilometer dari sisi barat, timur, utara maupun selatan sebelum terjadi erupsi.
- d. Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga yang terakhir adalah menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana

dan terkoordinir. Dilihat dari dimensi responsibilitas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga bekerjasama dan mengkoordinasikan mitra-mitra yang terakit dengan bencana untuk mengadakan rapat pada tanggal 11 Maret 2014 dan 13 Maret 2013 sebelum melaksanakan kegiatan pra bencana di Desa Kutabawa.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Dilihat dari dimensi kualitas layanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga harus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki melalui pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam kebencanaan dan dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Kekurangan sumber daya manusia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga perlu segera ditangani dengan penambahan sumber daya manusia dengan rekrutment sesuai yang dibutuhkan melalui kebijakan Pemerintah atau dengan menambah tenaga honorer.
- b. Dilihat dari dimensi responsivitas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga harus melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif lagi atau dilakukan setiap 3 sampai 6 bulan sekali agar masyarakatnya mau berpartisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masyarakatnya diberi pengertian tentang mitos Gunung Slamet yang tidak selamanya benar dan bencana bisa terjadi kapan saja sesuai kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

<sup>1</sup>Andhini Amirudin Ambo, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, [andhini.ambo@yahoo.com](mailto:andhini.ambo@yahoo.com)

<sup>2</sup>Susi Sulandari, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Nina Widowati, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

## DAFTAR REFERENSI

Amins, Achmad, (2009). *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : LaksBang

Nawai Uha, Ismail, (2013). *Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja*. Jakarta : Kencana

Ahmadi, Rulam, (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media

Nurjanah, (2010). *Manajemen Bencana*. Bandung : Alfabeta.

Ramli, Soehatman, (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*.

Jakarta : Dian Rakyat

Purnomo, Hadi, (2010) : *Manajemen Bencana Respons dan Tindakan terhadap Bencana*. MedPress.

Yulaelawati, Ella, (2008). *Mencerdasi Bencana*. Jakarta : Grasindo.

Mufiz, Ali, (2004). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Universitas Terbuka

Kusumasari, Bevaola, (2004). *Manajemen Bencana Dan Kapasitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta : Gava Media.

Dwiyanto, Agus, (2009). *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media

BNPB (2011) : *Panduan Kontinjensi Menghadapi Bencana*.

BNPB (2011) : *Jurnal Penanggulangan Bencana*.

Bakornas PB (2007) *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia*. Jakarta.

BNPB (2011) : *Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*.

BNPB (2006) : *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2007*.

---

<sup>1</sup>Andhini Amirudin Ambo, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, [andhini.ambo@yahoo.com](mailto:andhini.ambo@yahoo.com)

<sup>2</sup>Susi Sulandari, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Nina Widowati, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro